

## **Increase In Indonesia's Defense Budget, As A Impact Of The Security Dilemma And Arms Race In The Southeast Asian Region**

### **Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia, Sebagai Dampak Dari *Security Dilemma* Dan *Arms Race* Di Kawasan Asia Tenggara**

Muhammad Arsy Ash Shiddiqy<sup>1\*</sup>, Syahrul Akmal Latif<sup>2</sup>, Dini Tiara Sasmi<sup>3</sup>

Universitas Islam Riau<sup>1,2,3</sup>

[arsyshiddiq@soc.uir.ac.id](mailto:arsyshiddiq@soc.uir.ac.id)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This paper describes the increase in Indonesia's defense budget from year to year as a result of the Security Dilemma and Arms Race that occurred in the Southeast Asian region. During the cold war era, security in the Southeast Asian region was guaranteed by the two superpowers, namely the United States and the Soviet Union. A kind of bias happened in this region, when the cold war ended, European countries committed to lowering their military budgets, and the opposite happened in Southeast Asia. After the end of the cold war and the absence of security guarantees from the two countries, Southeast Asian countries began to aggressively increase their military budgets and defense capabilities, resulting in a Security Dilemma and Arm Race in this region. In particular, Indonesia experienced an increase in the military budget from year to year, starting from 2007 amounting to Rp. 32 T to 2017 108 T and this year 2022 is 137 T. The increase in military and defense budgets has also occurred in all ASEAN countries, this is clear evidence of the Security dilemma and Arm Race in the Southeast Asian region. The research method used is descriptive qualitative research by describing all phenomena of research problems empirically. This study aims to explain and analyze the dynamics of the Security Dilemma and Arm Race that occurred in the Southeast Asia region, as well as Indonesia's involvement in this phenomenon so as to increase the defense budget every year.*

**Keywords :** Indonesian Defense Budget, Security Dilemma, Arms Race, Southeast Asia Region

#### **ABSTRAK**

Tulisan ini menjelaskan tentang kenaikan anggaran pertahanan Indonesia dari tahun ketahun sebagai dampak dari *Security Dilemma* dan *Arms Race* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pada era perang dingin keamanan di kawasan Asia Tenggara dijamin oleh kedua negara super power yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Semacam hal bias terjadi di kawasan ini, ketika perang dingin berakhir negara-negara di Eropa berkomitmen untuk menurunkan anggaran meiliternya, dan justru hal sebaliknya terjadi di Asia Tenggara. Setelah berakhirnya perang dingin dan tidak adanya lagi jaminan keamanan dari kedua negara tersebut, negara-negara Asia Tenggara mulai gencar meningkatkan anggaran militer dan kemampuan pertahanan mereka sehingga terjadi *Security Dilemma* dan *Arm Race* di kawasan ini. Khususnya Indonesia, mengalami kenaikan anggaran militer dari tahun ketahun, terhitung dari tahun 2007 sebesar Rp. 32 T hingga 2017 108 T dan pada tahun ini 2022 sebesar 137 T. Kenaikan anggaran militer dan pertahanan juga terjadi pada semua negara ASEAN, ini adalah bukti nyata terjadinya *Security dilemma* dan *Arm Race* dikawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa dinamika *Security Dilemma* dan *Arm Race* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, serta keterlibatan Indonesia dalam fenomena ini sehingga meningkatkan anggaran pertahanan setiap tahunnya.

**Keywords :** Anggaran Pertahanan Indonesia, *Security Dilemma*, *Arms Race*, Kawasan Asia Tenggara

## 1. Pendahuluan

Meskipun situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara saat ini dalam kondisi damai dan tidak ada konflik yang terlalu signifikan, namun tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya ancaman perang mungkin saja terjadi di masa-masa yang akan datang. Solusinya adalah penting melakukan peningkatan kemampuan militer dan pertahanan negara melalui kenaikan anggaran pertahanan setiap tahunnya, ini tidak bisa dihindari lagi (Irawan, 2013: 18). Situasi keamanan di Asia Tenggara pasca Perang Dingin dianggap masih belum menentu, tidak seperti di Eropa, kancah utama Perang Dingin dimana berakhirnya Perang Dingin dibarengi dengan munculnya tekanan-tekanan tentang perlunya reduksi anggaran militer dan tuntutan akan keuntungan dari suatu perdamaian, di Asia Tenggara terjadi perkembangan yang sebaliknya. Harian *the Economist* dalam edisi tanggal 20 Februari 1993 mencatat bahwa negara-negara Asia kini sedang terlibat dalam proses pembangunan kekuatan militer. Analisis militer *Michael T. Klare*, dalam pengamatannya yang diterbitkan *Foreign Affairs* edisi *Summer* 1993 telah memprediksi bahwa perlombaan senjata akan berlangsung secara intensif di Asia Pasifik. Demikian pula dalam laporan *Institute for Defense and Strategic Analyses* (IDSA, New Delhi) edisi tahun 1998-1999 anggaran pertahanan/belanja militer dan akuisisi persenjataan negara-negara Asia mengalami kecenderungan yang meningkat. Khusus untuk negara-negara Asia Tenggara, hasil studi yang dilaksanakan Amitav Acharya tahun 1994 juga menunjukkan gejala yang sama.

Salah satu fungsi utama keberadaan militer di suatu negara adalah untuk mengisi peran pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah. Berada tepat di tengah dua Samudra dan dua benua, Indonesia merupakan negara yang sarat akan ancaman. Sekelumit sejarah tentang keamanan masa lalu kawasan Asia Tenggara. Filipina dan Malaysia yang memiliki sengketa di utara Kalimantan. Malaysia dan Thailand memiliki masalah tentang perbatasan. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura bahkan lebih parah sampai ke taraf apa yang kita kenal dengan konfrontasi, walaupun konfrontasi ini kemudian berakhir sebelum terbentuknya ASEAN. Sementara itu, perang sipil Vietnam mengalami peningkatan eskalasi dan Amerika Serikat mulai turut campur, Laos dan Kamboja pun turut terjerat dalam situasi yang serupa. Dengan latar belakang geopolitik kawasan yang suram seperti itulah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand mendeklarasikan berdirinya ASEAN pada tahun 1967(1).

Dilema Keamanan adalah suatu keadaan yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya dengan cara meningkatkan pertahanan atau dengan cara membentuk aliansi dengan negara lain sebagaimana dilakukan oleh negara tetangganya, karena perasaan “khawatir” akan keamanan negaranya sendiri. Menurut John H. Herz, dilema keamanan adalah “gagasan struktural di mana upaya-upaya yang diambil oleh sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun niatnya, cenderung memicu ketidak nyamanan bagi negara-negara lain, terutama negara yang berada di sekitarnya, karena masing-masing negara (yang mengambil tindakan tersebut) menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam.

Perlombaan Senjata didefinisikan sebagai suatu dinamika proses interaksi antar-negara atau koalisi negara-negara yang kompetitif, dinamis, dan dengan keadaan terpaksa mengakuisisi persenjataan mereka. “*Arms Race is a situation in which two or more countries try to have more and stronger weapons than each other*” (Perlombaan Senjata adalah situasi dimana dua atau lebih negara berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat persenjataan daripada negara lain). *Arms race* juga bisa diartikan sebagai usaha kompetitif terus menerus (secara militer) yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kapabilitas untuk membuat senjata lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain.

Anggaran militer juga dikenal dengan anggaran pertahanan, adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Anggaran militer sering kali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain. Anggaran militer juga memberi gambaran mengenai berapa banyak belanja militer yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Besarnya anggaran militer suatu negara mencerminkan kemampuan suatu negara untuk mendanai kegiatannya. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), total pengeluaran militer dunia mencapai 1,735 triliun US\$ pada tahun 2011.

Membangun kekuatan militer yang kuat membutuhkan anggaran yang besar. Di dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2018 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar Rp107,7 triliun (US\$6,9 miliar), lebih banyak dibanding Kementerian Kesehatan (Rp59,1 triliun), Kementerian Riset dan Teknologi (Rp41,3 triliun), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp40,1 triliun).

**Tabel 1. Daftar Anggaran Militer Negara-Negara Asia Tenggara 2022**

No.	Negara	Anggaran Militer
1.	Indonesia	\$ 9,300,000,000/Rp 138,1 T
2.	Vietnam	\$ 6,237,600,000/Rp 94 T
3.	Thailand	\$ 2,933,000,000/Rp 43,6 T
4.	Myanmar	\$ 2,285,000,000/Rp 34 T
5.	Malaysia	\$ 3,792,000,000/Rp 56,3 T
6.	Philippina	\$ 4,340,000,000/Rp 64,5 T
7.	Singapura	\$ 11,560,000,000/Rp 171,6 T
8.	Kamboja	\$ 632,000,000/Rp 9,4 T
9.	Laos	\$ 38,280,000/Rp 569 M

Sumber: diolah oleh Peneliti Berdasarkan Global Fire Power

Meskipun Indonesia didapuk sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara pada 2022, namun pada nyatanya anggaran militer yang dicanangkan oleh Indonesia bukanlah yang tertinggi di Asia Tenggara. Anggaran militer dialokasikan oleh pemerintah masing-masing negara dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan angkatan bersenjata baik untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pendanaan personel. Anggaran militer diperlukan untuk merawat dan memperbaiki armada perang atau alutsisa militer sebuah negara. Berdasarkan data *Global Fire Power (GFP) 2022*, Indonesia tercatat memiliki anggaran untuk pertahanan sebesar 9,3 miliar dollar AS atau sekitar lebih dari Rp 137 triliun. Dengan nilai itu, Indonesia menjadi negara dengan anggaran militer terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. Singapura sendiri, memiliki anggaran militer sebesar 11,56 miliar dollar AS atau Rp 170 triliun.

Pergeseran aktivitas militer AS ke Asia tampaknya juga telah mempengaruhi negara-negara di kawasan untuk menyesuaikan diri atas kemampuan militernya. Setidaknya hal itu dilakukan untuk bisa sedikit mengimbangi kehadiran militer AS yang kini diproyeksikan ke wilayah Asia. Negara-negara di Kawasan sebagai tuan rumah tentunya tidak ingin hanya menjadi penonton dalam melihat kehadiran militer AS di Asia. Mereka juga perlu menampilkan diri dengan percaya diri dalam menghadapi kekuatan militer AS sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Untuk itu peningkatan kekuatan militer menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara sekaligus untuk membangun kemandirian dalam hal pengamanan wilayah kedaulatan negara.

Tampilnya Tiongkok sebagai negara besar di kawasan dengan modernisasi militernya, sudah tentu juga turut memengaruhi negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kekuatan militernya, terutama negara-negara yang memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok di LCS dan Laut China Timur. Dalam beberapa tahun ini Tiongkok terus memperlihatkan LCS yang

bersinggungan dengan beberapa negara anggota ASEAN dan Laut China Timur yang bersinggungan dengan Jepang. Tiongkok dengan belanja militernya yang terus meningkat (kedua tertinggi setelah AS), terus membangun kekuatan militer yang lebih modern dan sudah tentu diproyeksikan untuk dapat menerobos lebih dalam ke perairan sengketa di LCS dan Laut China Timur. Perlombaan senjata di Asia Tenggara juga dipicu oleh campur tangan Amerika. Untuk menandingi Cina, Washington meningkatkan hubungan dan kerjasama militer dengan Filipina, Indonesia dan Australia. Berarti negara-negara tersebut lebih mudah tembus ke sektor industri militer Amerika.

Kenaikan anggaran pertahanan negara-negara kawasan Asia Tenggara jelas merupakan konsekuensi dari *Security Dilemma* dan *Arm Races* yang terjadi di kawasan, terkhusus Indonesia sebagai negara terluas dan terbesar penduduknya, tentu saja memiliki tanggung jawab yang lebih rumit dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, oleh karena itu penguatan kemampuan militer dan pertahanan tidak bisa terelakan, dan cara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan tersebut adalah dengan meningkatkan belanja militer ataupun anggaran pertahanan negara.

Untuk dapat menganalisa permasalahan diatas, penulis menggunakan sejumlah referensi dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Security Dilemma & Arms Race* dan Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya karena yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia sebagai konsekuensi dari *Security Dilemma* dan *Arms Race* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Beberapa penelitian tersebut adalah: Arfin Sudirman dan Deasy Silvy Sari, 2017; *Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas, 2014*; Dewitt dan David, 1994; Mathews dan Jessica Tuchman, 1988; Alexander J. Oliver, 2009. Sebagian besar dari penelitian tersebut hanya menjelaskan kondisi keamanan kawasan Asia Tenggara secara umum, namun tidak terlalu mengkaji tentang potensi-potensi konflik lain seperti *Security Dilemma* dan *Arm Race* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

## 2. Tinjauan Pustaka

Dalam perjalanan panjang studi Ilmu Hubungan Internasional, *Security Dilemma* dikenal sebagai salah satu konsep besar yang digunakan dalam menganalisa keadaan internasional di mana situasi keamanan dan kedamaian di dalamnya tidak dapat sepenuhnya dijamin. Dari dulu hingga dewasa ini, keamanan merupakan kepentingan vital bagi setiap negara. Setiap negara harus mampu menjamin keamanannya sendiri. Kekuatan negara tanpa keamanan yang terjamin pastinya akan membuat kekuatan dan kekuasaan di negara tersebut runtuh dengan mudahnya.

*Security Dilemma* adalah salah satu konsep dalam teori Realisme yang muncul akibat adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya namun di satu sisi ini menimbulkan reaksi dari negara lain yang juga ingin meningkatkan keamanannya dan pada akhirnya hal ini menyebabkan penurunan keamanan di negara pertama. Hal ini dapat terjadi karena suatu negara merasa terancam terhadap kekuatan yang dimiliki oleh negara lain sehingga berusaha untuk meningkatkan persenjataan dan pertahanannya yang berakhir dengan suatu keadaan dimana banyak negara berlomba-lomba untuk memproduksi senjata. *Security Dilemma* pada dasarnya merupakan suatu refleksi dari kesulitan pemerintah suatu negara untuk menentukan pilihan kebijakan keamanannya. Jika suatu negara mengurangi usaha-usaha untuk memperkuat keamanannya dengan tujuan menciptakan hubungan yang damai dengan negara lain, maka konsekuensinya adalah negara tersebut rawan (*vulnerable*) untuk diserang oleh negara lain.

*Arms Race* didefinisikan sebagai suatu dinamika proses interaksi antar negara atau koalisi negara-negara yang kompetitif, dinamis, dan dengan keadaan terpaksa mengakuisisi

persenjataan mereka. *“Arms Race is a situation in which two or more countries try to have more and stronger weapons than each other”* (Perlombaan Senjata adalah situasi dimana dua atau lebih negara berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat persenjataan daripada negara lain). *Arms race* juga bisa diartikan sebagai usaha kompetitif terus menerus (secara militer) yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kapabilitas untuk membuat senjata lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain.

Karena dunia dan sistem internasional yang terdapat di dalamnya bersifat anarkis, negara kerap membangun dan meningkatkan kekuatan militer untuk tujuan pertahanan dan keamanannya. Namun, karena berbagai negara tidak menyadari niat masing-masing, negara-negara lain bukannya menafsirkan tindakan tersebut sebagai tindakan defensif tapi justru akan merespon tindakan tersebut sebagai tindakan ofensif. Dan jika demikian, negara-negara lain mungkin akan mengambil tindakan agresif sebagai respon yang kemudian akan menciptakan situasi yang tidak stabil. Degan begitu akan ada kemungkinan terciptanya *Arms Race* atau perlombaan senjata antara negara-negara, terutama negara yang berada di suatu kawasan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut banyak dilakukan di lingkungan ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi dan psikologi. Ilmu politik dan Hubungan Internasional juga menjadi bagian rumpun ilmu yang paling banyak menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pilihan dalam melakukan riset. Beberapa definisi generik dari metode penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial(2).

Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia sebagai dampak dari *Security Dilemma* dan *Arm Races* yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karakteristik informan dianggap mampu memberikan informasi terkait Anggaran Pertahanan Indonesia dan *Security Dilemma* dan *Arm Races* yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dilakukan dengan informan kunci. Pengolahan data dilakukan melalui pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan verifikasi data. (Miles & Huberman, 1992). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam melakukan penelitian melalui kegiatan observasi lapangan, kegiatan FGD dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau berkaitan dengan Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara, terdiri dari; laporan tahunan dan hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan yang berkaitan dengan masalah penelitian serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Hasil Dan Pembahasan

Istilah *Security Dilemma* sendiri diciptakan oleh akademisi kebangsaan Jerman, John H. Herz, lewat bukunya, *Political Realism and Political Idealism*, pada tahun 1951. Menurut John H. Herz, dilema keamanan atau *security dilemma* dalam Hubungan Internasional adalah “gagasan struktural di mana upaya-upaya yang diambil oleh sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun niatnya, cenderung memicu ketidak nyamanan bagi negara-negara lainnya terutama negara yang berada di sekitarnya, karena masing-masing negara menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam”.

*Arms Race* terjadi sesuai dengan teori neorealisme yang menekankan bagaimana sistem internasional yang anarki ternyata bisa menjadi damai dengan adanya konsep *balance of power*. Menurut Mearsheimer yang dikutip dalam buku "*Balance of Power In World History*" oleh Stuart J. Kaufman, Richard Little dan William C. Wohlforth, negara-negara kuat (*great powers*) akan berusaha untuk mempertahankan hegemoni mereka di dunia. Usaha-usaha negara ini untuk mempertahankan hegemoni mereka bisa dilakukan dengan menyeimbangkan kekuatan negara mereka satu sama lain. Mereka bersaing satu sama lain agar tidak *ketinggalan*, sehingga nanti akan muncul keseimbangan atau *equilibrium*. Namun sayangnya, konsep *balance of power* ini mengakibatkan terjadinya *arms race*. *Arms race* pada prinsipnya memiliki keuntungan sebagai penyeimbang kekuatan bagi negara kuat yang "bisa saja" akan bertindak semaunya terhadap negara yang lebih kecil, keadaan yang menguntungkan tersebut bisa saja menjadi pemantik perang karena didasari oleh benturan kepentingan satu sama lain.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwasanya konsep keamanan menurut kaum Realis adalah kekuatan penuh militer suatu negara. Keamanan dan keterjaminan suatu negara tidak diintervensi oleh negara lain adalah kekuatan militernya, semakin besar dan kuat kekuatan militer suatu negara maka semakin kecil pula kemungkinan untuk diintervensi oleh negara lain, begitu juga dengan daya saingnya dalam perpolitikan internasional, menurut kaum Realis kedudukan suatu negara dalam politik internasional sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam kompetitif dibidang Militer dan Ekonomi. Dan tentunya kekuatan militer suatu negara akan sangat kuat jika di topang oleh Anggaran Pertahanan yang besar pula. Satu hal yang mendasar dalam Realisme yaitu bahwa negara memandang negara lain sebagai musuh potensial yang mengancam keamanan, suatu ide yang berasal dari pemahaman bahwa setiap manusia cenderung agresif dan memangsa manusia lainnya, dan ini adalah hal yang alamiah. Artinya kelemahan negara menjadi pemicu bagi negara lain untuk membangun kekuatan yang lebih besar agar dapat menginvasi negara lemah. Sebaliknya, kekuatan yang terlalu besar atau ekstrim pada negara lain akan memicu sebuah negara untuk semakin meningkatkan pertahanan dan mengumpulkan kekuatan. Ini yang disebut dengan *Security Dilemma*.

#### **a. Security Dilemma & Arms Race di Kawasan Asia Tenggara**

Dinamika *Security Dilemma* dan *Arms Race* benar-benar terjadi di kawasan Asia Tenggara pasca perang dingin. Setelah tidak adanya jaminan keamanan dari dua negara super power yaitu Amerika dan Uni Soviet, persis seluruh negara di kawasan harus meningkatkan kemampuan militernya masing-masing. Meningkatkan anggaran militer, meningkatkan kerja sama pertahanan, pelatihan kembali personil militer, penambahan dan pembaharuan alat-alat tempur, hingga meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri masing-masing. Semua ini dilakukan karena negara-negara di kawasan menyadari betapa potensi konflik di kawasan kedepan sulit ter-elakan. melalui penelitian ini penulis ingin menganalisa dinamika *Security Dilemma* dan *Arms Race* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagai factor penting membuat Indonesia sadar akan perlunya peningkatan kekuatan militer melalui Peningkatan Anggaran Pertahanan setiap tahunnya.

Peningkatan kekuatan militer tentu saja menjadi hal yang sensitif sebab dapat menyebabkan *security dilemma* bagi negara lain. Adagium *security dilemma* setidaknya menegaskan dua hal. *Pertama*, upaya peningkatan kekuatan militer suatu negara kecenderungannya selalu dimaknai sebagai sarana pengembangan kekuatan ofensif oleh negara lain, dan *kedua*, sulit dibedakannya antara kekuatan defensif dengan kekuatan ofensif. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya salah kalkulasi (*miscalculation*), salah penilaian (*misjudgment*) dan saling mencurigai (*mistrust*). Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan keniscayaan, terlebih lagi jika ada faktor penggerak ke arah sana. Artinya, peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan ini tidak berdiri sendiri tetapi ada faktor yang menggerakkan ke arah itu. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, bahwa faktor-

faktor penggerak tersebut adalah adanya ketegangan regional, sengketa perbatasan, perebutan sumber daya alam, pergeseran aktivitas militer Amerika Serikat ke Asia, dan semakin meningkatnya kehadiran Tiongkok di LCS.

Dilema keamanan dan perlombaan senjata yang terjadi di kawasan Asia Tenggara masih berada pada tingkat kompetisi persenjataan konvensional, belum pada level perlombaan senjata yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing, Indonesia secara umum sudah mengimbangi dan bahkan leading. Modernisasi militer atau peningkatan kekuatan militer yang terjadi di Asia, khususnya Asia Tenggara sesungguhnya juga merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonominya. Hal inilah yang terjadi pada lima negara utama di Asia Tenggara yang disebut dengan *the Big Five*, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Selain itu, meluasnya cakupan keamanan regional yang harus dijaga yang didasari oleh kepentingan nasional masing-masing telah turut pula mendorong negara-negara di kawasan untuk melakukan peningkatan kekuatan militernya agar dapat menjangkau cakupan wilayah keamaannya. Indonesia, Malaysia dan Singapura misalnya berkepentingan dengan keamanan Selat Malaka, begitu juga dengan negara-negara Asia lain yang menjadikan perairan strategis tersebut sebagai jalur pasokan energi dan perdagangan mereka. Peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan akan menjadi masalah, jika disalah persepsikan dan dicurigai sebagai bentuk ancaman bagi keamanan di kawasan(3).

Dalam perjalanan panjang studi Ilmu Hubungan Internasional, *security dilemma* dikenal sebagai salah satu konsep besar yang digunakan dalam menganalisa keadaan internasional di mana situasi keamanan dan kedamaian di dalamnya tidak dapat sepenuhnya dijamin. *Security Dilemma* pada umumnya terjadi pada suatu kondisi dimana suatu negara meningkatkan kebijakan kekuatan pertahanannya yang murni ditujukan untuk *self defence* (pertahanan diri) namun seringkali dianggap lain oleh negara lain bahwa hal tersebut bertujuan untuk menyerang. Hal ini yang kemudian mendorong negara musuh untuk menyuplai senjata demi meningkatkan kekuatan militernya yang disebabkan oleh mereka berusaha untuk mengambil kecenderungan terburuk bahwa negara yang dihadapinya sedang berusaha untuk melakukan penyerangan(4).

Dilema keamanan rentan terjadi di setiap kawasan, baik kawasan yang rawan konflik seperti Asia Timur dan Asia Selatan, maupun Kawasan yang relative damai seperti Asia Tenggara, China dan Jepang serta Korea Selatan dan Korea Utara merupakan contoh nyata di mana ketegangan timbul sebagai hasil dari peningkatan keamanan. Dalam respon yang serupa, China juga sudah memodernisasi militernya. Masing-masing negara justru merasa terancam oleh peningkatan kekuatan militer dari negara lain. Ancaman tersebut kemudian mendorong mereka untuk ikut mengambil upaya dalam meningkatkan pertahanan dan keamannya. Begitu juga India dan Pakistan Salah satu bentuk nyata yang paling sering terjadi hingga kini tentang dilema keamanan. Contohnya lainnya, ketika Iran memproduksi nuklir dengan alasan untuk menggantikan minyak sebagai sumber tenaga utama, Israel dan berbagai negara di kawasan tersebut merasa terancam dan ikut mengambil langkah yang sama guna mengimbangi Iran. Begitu juga halnya dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, ketika Singapura secara massif meningkatkan anggaran militer serta membeli peralatan militer secara besar-besaran maka negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia juga melakukan hal yang sama karena merasa terancam dengan apa yang dilakukan Singapura dibidang pertahanan.

Perang ataupun persiapannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan nasional yang memadai. Ada 3 unsur di dalam kekuatan finansial, yaitu anggaran pertahanan (*defense budget*), cadangan devisa dan emas (*reserve of foreign exchange and gold*), dan kemampuan pembelian/pembayaran

(*purchasing power*). Unsur yang paling perlu diperhatikan adalah cadangan devisa dan belanja pertahanan. Dari dua unsur tadi, Singapura lebih unggul dengan memiliki cadangan devisa maupun belanja pertahanan paling besar. Ini berarti Singapura memiliki peluang lebih besar untuk mempersiapkan suatu perang ataupun membiayai peperangan. Indonesia memiliki kemampuan pembelian paling besar di antara negara-negara yang diperbandingkan di sini. Ini berarti, dari sisi finansial, Indonesia memiliki peluang yang paling besar untuk mentransformasikan aset-aset ekonominya dalam membiayai dan mempersiapkan perang. Sekalipun demikian, kemampuan pembelian membutuhkan waktu dan mekanisme politik yang tidak semudah mentransfer pembiayaan seperti pada cadangan devisa dan belanja pertahanan(5).

**Tabel 2. Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-Negara Asia Tenggara**

	Indonesia	Malaysia	Thailand	Singapore	Philipina	Vietnam
World Rank	15	48	29	42	51	28
Financial (USD)						
1. Defense Budget	9.300.000.000	3.792.819.200	2.933.064.054	11.560.000.000	4.390.000.000	6.237.000.000
2. Reserve of Forex&Gold	130.200.000.000	102.400.000.000	202.600.000.000	279.800.000.00	81.570.000.000	49.500.000.000
3. Purchasing Power	3.130.470.000.000	855.600.000.000	1.200.200.000.000	531.900.000.000	871.560.000.000	800.000.000.000
4. External Debt	393.252.000.000	224.596.000.000	167.890.000.000	1.557.646.000.000	81.995.000.000	96.580.000.000

Sumber: *Global Fire Power (2022)*

*Arms Race* didefinisikan sebagai suatu dinamika proses interaksi antar negara atau koalisi negara-negara yang kompetitif, dinamis, dan dengan keadaan terpaksa mengakuisisi persenjataan mereka. "*Arms Race is a situation in which two or more countries try to have more and stronger weapons than each other*" (Perlombaan Senjata adalah situasi dimana dua atau lebih negara berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat persenjataan daripada negara lain). *Arms race* juga bisa diartikan sebagai usaha kompetitif terus menerus (secara militer) yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang masing-masing memiliki kapabilitas untuk membuat senjata lebih banyak dan lebih kuat daripada yang lain.

Pertahanan negara menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertahanan negara yang kokoh akan mampu mewujudkan bangsa yang kuat. Pembangunan pertahanan yang kuat menuntut dipenuhinya kebutuhan Alutsista modern. Indonesia menargetkan bisa memproduksi peralatan militernya sendiri dan tidak bergantung pada negara lain pada tahun 2029. Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di Asia Tenggara. Salah satu ukurannya adalah kualitas prajurit militernya. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki senjata yang tak kalah canggih dengan negara-negara lain. Bahkan Indonesia punya senjata buatan sendiri, yang diekspor ke negara lain seperti Singapura dan Thailand. PT. Pindad yang membuat senjata canggih Indonesia yang dikirim ke luar negeri(6).

Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari segi pertahanan, Indonesia memiliki armada militer yang bakal membuat para negara tetangganya ketar ketir. Menurut data dari *Global Firepower Index (GFP Index)*, kekuatan militer Indonesia berada di atas rata-rata negara di Asia Tenggara, bahkan lebih tinggi di atas Australia. Ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia tidak boleh dipandang remeh oleh para negara tetangganya negara-negara Asia Tenggara termasuk Australia. Bukti nyatanya adalah Kelengkapan alat persenjataan darat yang dimiliki militer Indonesia. Selain memiliki alat tempur yang lengkap, Indonesia juga memiliki Industri Pertahanan dalam negeri sendiri yang bisa memproduksi Alutsista untuk kebutuhan militernya. Diantaranya adalah Senapan Ringan dan Berat, Rudal dan Amunisi, Kendaraan Tempur, Serta *Medium Battle Tank* yang semuanya sudah bisa di produksi oleh PT. Pindad. Hal tersebutlah yang membuat negara-negara tetangga ciut dengan kemampuan militer Indonesia.



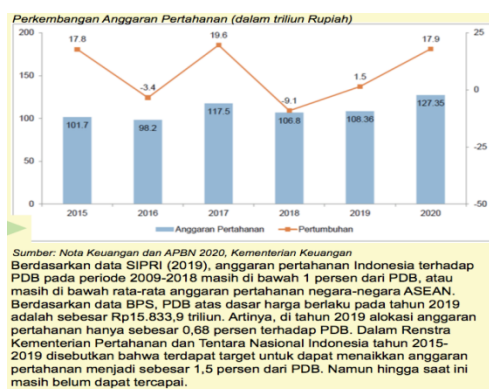
## b. Kenaikan Anggaran Pertahanan Indonesia

Penyusunan Anggaran Pertahanan adalah tugas Kementerian Pertahanan, selanjutnya secara hierarki Panglima TNI menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran. Sistem Program dan Anggaran adalah suatu kesatuan tata cara pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Kementerian Pertahanan yang adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan(7).

Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam Nota Keuangan terdapat uraian-uraian yang sangat jelas terkait Anggaran militer atau juga dikenal dengan anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Anggaran militer seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain. Anggaran pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat besar untuk negara. Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu target pemerintah Indonesia di bidang pertahanan adalah melalui kemandirian industri pertahanan atau kemampuan untuk memproduksi peralatan militer sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Salah satu tantangan yang hendak dicapai adalah target *Minimum Essential Force* (MEF) dimana program MEF bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi kekuatan pertahanan agar menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi perdamaian(8).

Menurut (Kunio , 999), pengeluaran belanja militer merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah Negara. Perbelanjaan militer merupakan suatu yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan menjadi sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga sistem pertahanan negaranya (SIPRI). Terlaksananya kemampuan pertahanan negara membutuhkan daya dukung anggaran. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Anggaran Pertahanan mengalami tren yang meningkat sejak 2018 sebesar Rp106,8 triliun menjadi Rp127,35 triliun di tahun 2020, dan pada tahun 2022 anggaran pertahanan mencapai Rp137 Triliun. Saat ini, alokasi terbesar anggaran pertahanan adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 41,6 persen, untuk belanja barang sebesar 32,9 persen dan untuk belanja modal sebesar 25,4 persen. Selama ini, anggaran militer Indonesia sebagian besar tersalurkan pada belanja matra darat. Pada tahun 2019 anggaran militer untuk TNI-AD sebesar Rp44,96 triliun, TNI-AL sebesar Rp17,44 triliun dan TNI-AU sebesar Rp13,76 triliun. Di tahun 2020, anggaran untuk TNI-AD sebesar Rp55,92 triliun, TNI-AL sebesar Rp22,08 triliun dan TNI-AU sebesar Rp15,50 triliun. Kementerian Pertahanan juga mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp10,86 triliun yang terdiri Rp4,59 triliun untuk matra darat, Rp4,16 triliun untuk matra laut dan Rp2,11 triliun untuk matra udara.

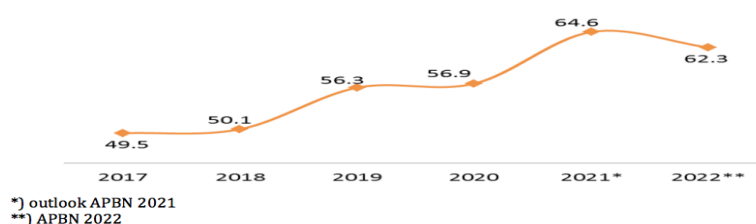


**Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pertahanan Indonesia 2020**

Pada tahun 2022 ini, Kemhan yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp137 triliun dalam RAPBN 2022. Jumlah ini meningkat 13 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran Kemhan pada APBN 2021. Berdasarkan rencana penggunaan anggaran tersebut, di antaranya adalah untuk program modernisasi Alutsista. Di samping anggaran ini juga digunakan untuk kebutuhan non-Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Secara total untuk ketiga kebutuhan tersebut, Kemhan mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,26 triliun. Anggaran belanja khusus untuk persenjataan di Kemhan sebesar Rp43,26 triliun itu, berarti meningkat 33 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran di APBN 2021 sebesar Rp32,48 triliun. Pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) secara bertahap.

Anggaran Belanja Pertahanan Masih di Bawah 1 persen PDB dan sebagian besar terserap untuk Matra Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat merupakan salah satu kekuatan utama dalam struktur pertahanan militer Indonesia. Berdasarkan Perkasad No 57 Tahun 2013 bahwa tugas TNI-AD adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dengan prioritas yang diarahkan untuk mencapai *Minimum Essential Force*. Dalam rangka tugas tersebut, TNI-AD membutuhkan alutsista yang canggih, modern dan presisi. Sebagai matra kekuatan utama militer, TNI-AD mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan dua matra lainnya(9).

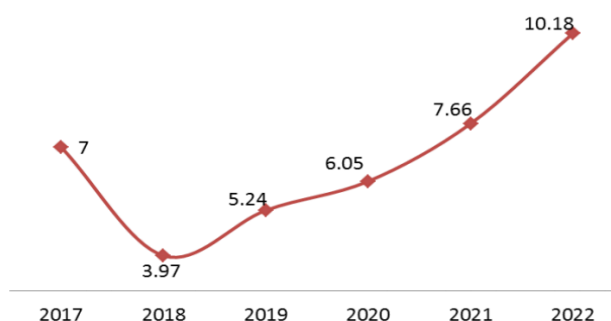
Anggaran TNI-AD Relatif Besar Untuk Program Manajemen dan Operasional. Anggaran TNI-AD terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sejak 2010 rata-rata alokasi anggaran untuk TNI-AD hampir mencapai setengah (44%) dari total anggaran Kemhan yang tembus Rp.137,3 triliun pada 2021. Sedangkan 56% masing-masing terbagi ke dalam empat instansi dalam lingkup Kemhan diantaranya; Kemhan (18%), Mabes TNI (8%), TNI AL (16%) dan TNI AU (13%). Rata-rata anggaran TNI-AD tumbuh 4,71% per tahun. Besarnya anggaran TNI-AD tersebut diserap oleh dua program besar yaitu program penyelenggaraan manajemen dan operasional dan program modernisasi alutsista.



**Gambar 2. Perkembangan Realisasi Anggaran TNI-AD Periode 2017-2022 (Triliun Rupiah)**

Sumber: LKPP dan NK APBN, diolah

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan manajemen rata-rata menyedot 77,36% atau sebesar Rp43,8 triliun dari total anggaran TNI-AD selama periode 2017-2022. Selain untuk dua program terbesar, alokasi anggaran TNI-AD diperuntukkan pada program lainnya seperti; Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, Program pembinaan sumber daya pertahanan, dan Program riset, industri dan pendidikan tinggi pertahanan. Anggaran untuk ketiga program tersebut hanya sebesar 10,84% atau rata-rata Rp6,14 triliun selama periode 2017-2022. Anggaran Modernisasi Alutsista Masih Di Bawah 12%. Anggaran modernisasi alutsista masih relatif kecil dibandingkan dengan total anggaran TNI-AD dan bahkan anggaran Kemhan. Selama periode 2017-2022, rata-rata anggaran modernisasi alutsista TNI-AD hanya 11,8% atau Rp6,68 triliun. jumlah tersebut hanya 15,26% dari alokasi anggaran untuk penyelenggaraan manajemen dan operasional.



**Gambar 3. Perkembangan Realisasi Anggaran Alutsista TNI-AD Periode 2017-2022**

Sumber: LKPP dan NK APBN

Jumlah Alutsista TNI-AD Masih Minim. Hingga per Januari 2022, total jumlah alutsista TNI-AD dari lima jenis alutsista sebanyak 2.387 unit (*Global Firepower, 2022*). Alutsista jenis panzer mendominasi hingga mencapai 60,49% dari total jenis alutsista. Namun, alutsista jenis tank jumlahnya relatif masih sedikit atau hanya 13,15%. Demikian juga peluncur roket hanya 63 unit. Pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk alutsista TNI-AD sebesar Rp10,18 triliun digunakan untuk membeli 1 paket alutsista. Pemerintah masih menjadikan alutsista TNI sebagai salah satu belanja prioritas untuk fungsi pertahanan dengan tujuan agar target MEF dapat tercapai hingga 2024. Hingga per Desember 2018, capaian MEF TNI-AD sebesar 74,62%. TNI-AD menargetkan MEF tercapai 100% pada 2024. Alokasi anggaran modernisasi alutsista menjadi kata kunci yang tidak bisa ditunda. Agar upaya tersebut dapat terselenggara dengan baik, efektif, dan efisien diperlukan kesatuan tekad dan arah, serta keterpaduan usaha dari semua pihak dan instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan Anggaran Pertahanan yang ada, dan pelibatan lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan alutsista TNI.

## 5. penutup

### Kesimpulan

Perang adalah satu hal yang ditakutkan dan tidak diinginkan bagi semua manusia termasuk negara. Namun perang tidak bisa dipungkiri keberadaannya dari sejarah umat

manusia. Konflik dan perang dalam sejarah umat manusia telah ada sejak manusia mengenal kekuasaan dan kedudukan. Seiring berjalannya waktu, alat bantu (senjata) yang digunakan manusia juga beragam termasuk transformasi senjata tradisional sampai dengan senjata modern. Transformasi ini dikategorikan sebagai suatu kewajaran dimana kita tahu bahwa manusia akan selalu berusaha melindungi dan mencari keamanan bagi diri dan keluarganya. Inovasi dan transformasi yang dilakukan manusia ini sampai pada situasi yang disebut dengan *Arms Race* (Perlombaan Senjata). Segala bentuk persaingan pasti mempunyai kemungkinan konflik. Dalam hal ini *arms race* sebagai satu bentuk persaingan juga pasti akan menyebabkan konflik bahkan bisa saja sampai pada titik peperangan. Meskipun Charles L. Glaser dalam artikelnya mengatakan bahwa *Arms Race* tidak selalu buruk dan tidak melulu dikaitkan dengan perang namun tetap saja kemungkinan perang akan tetap ada.

Adagium kalangan realis yang menyebutkan, “jika ingin merasa damai bersiaplah untuk perang”, seakan relevan dengan semakin meningkatnya anggaran militer masing-masing negara. Semua menyadari bahwa kepentingan bisa diperjuangkan dengan jalan kekuatan, dan memandang militer sebagai prasyarat mutlak terlebih jika berbicara dalam konteks keamanan suatu negara. Kondisi multipolar saat ini memang telah menghapus rivalitas antara kedua blok yang eksis saat era perang dingin, namun tidak barang tentu berhasil menghapus rivalitas antara negara-negara yang masih memiliki perbedaan ideologi atau latar belakang sejarah yang buruk. *Enmity* di antara negara-negara yang bertetangga masih sangat tinggi. *Arm race* secara lebih jauh telah berbicara pada tataran teknologi dan semakin menjadi penyebab tingginya tensi dilema keamanan. Lebih jauh, perlombaan senjata nuklir di antara negara-negara maju menjadi ancaman yang sangat serius bagi keamanan internasional kontemporer. Secara lebih jauh, kita akan melihat bagaimana fenomena *security dilemma* begitu kentara termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan peningkatan anggaran pertahanan Indonesia mutlak dilakukan, mengingat banyaknya potensi ancaman yang bisa kapan saja menghantam kedaulatan Indonesia. Situasi *security dilemma* dan *Arms race* yang terjadi di kawasan Asia Tenggara adalah sebuah ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia. Komitmen seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menaikkan anggaran militer serta meningkatkan kemampuan militer mereka jika tidak di respon dengan hal yang sama maka akan membuat Indonesia terlihat lemah.

### Daftar Pustaka

- Andrew T.H. Tan. (2014). *The Arms Race in Asia: Trend, Causes and Implications*. New York, Routledge;
- Creswell JW. (2009). *Research design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE
- Andi Wijayanto. (2017). Sinyal Perlombaan Senjata di Asia. Kompas.
- Jervis R. (2004). Cooperation Under the Security Dilemma. *World Polit.* 30(2).
- SIPRI. South Asia and Gulf lead rising trend in arms imports, Russian exports grow [Internet]. Available from: [www.sipri.org](http://www.sipri.org)
- Amrullah MR. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki: Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan. *J Pertahanan Bela Negara.*;6(1):151–68.
- Bakrie CR. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia;
- Muhaimin YA. (2014). *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana;
- Subekti. (2012). Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok Minimum. *Yudhagama.*; 32(1).